



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja OPD sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Proses penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah semakin penting peranannya dikaitkan dengan pemendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi JPD dan JMD, serta tata cara pembukuan didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan



Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Jambi.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 juga disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga ada perbedaan mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tahun 2022.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan perbaikan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing serta 6 peroritas pembangunan di Kota Jambi yakni peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan pasyarakat, peningkatan produktivitas, pengembangan pariwisata dan investasi daerah, good governance dan ketentraman dan ketertiban Umum dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rancangan Peraturan Daerah
10. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Jambi, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan yang akan dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya. Tujuan penyusunan renja lainnya adalah mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Penerimaan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Kota Jambi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi Tahun Lalu juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi Tahun Lalu meliputi 3 (tiga) hal yaitu : (1) **kebijakan** perencanaan program dan kegiatan, (2) **pelaksanaan** rencana program dan kegiatan, (3) **hasil** rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu sebagai bahan dalam Penyusunan Perencanaan Tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun Anggaran 2023 melaksanakan 2 (Dua) Urusan pemerintah yaitu urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 4 (empat) program, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sbb:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp71.151.550,- Realisasi belanja sebesar Rp48.887.100 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, bahan komputer, kertas dan cover, bahan cetak, alat listrik, jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Realisasi Keuangan 68,71%.

2. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.42.338.690,- Realisasi belanja sebesar Rp38.709.490,- dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, honorarium pengelola website, jasa tenaga administrasi dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN. Realisasi Keuangan 91,43%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.671.508.195,- Realisasi belanja sebesar Rp4.105.820.681 dengan keluaran berupa belanja gaji pokok ASN, tunjangan keluarga ASN, tunjangan jabatan ASN, tunjangan fungsional umum ASN, tunjangan beras ASN, tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS, iuran jaminan kesehatan ASN, iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, iuran jaminan kematian ASN, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, belanja insentif ASN. Realisasi Keuangan 87,89%.

2. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp368.792.800, Realisasi belanja sebesar Rp311.054.400 dengan keluaran berupa belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan, Bahan Cetak, Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, serta Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN. Realisasi Keuangan 84,34%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp36.9345.420, Realisasi belanja sebesar Rp15.957.000 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Realisasi Keuangan 43,20%.



c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp62.937.000, Realisasi belanja sebesar Rp56.700.000 dengan keluaran berupa belanja Pakaian Batik Tradisional. Realisasi Keuangan 90,09%
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp10.000.000, Realisasi belanja sebesar Rp6.000.000 dengan keluaran berupa belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Jasa pelayanan kearsipan, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, Bimbingan teknis, serta Perjalanan dinas dalam kota. Realisasi Keuangan 60,00%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp6.175.485, Realisasi belanja sebesar Rp4.833.900 dengan keluaran berupa belanja bahan komputer dan alat listrik. Realisasi Keuangan 78,28%
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp182.133.680, Realisasi belanja sebesar Rp156.337.947 dengan keluaran berupa belanja bahan bangunan dan konstruksi, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, Parabot kantor, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, iuran jaminan kerja bagi non ASN. Realisasi Keuangan 85,84%
3. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp33.307.658, Realisasi belanja sebesar Rp24.958.800 dengan keluaran berupa belanja bahan cetak dan materai. Realisasi Keuangan 74,93%
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp11.863.125, Realisasi belanja sebesar Rp10.657.500 dengan keluaran berupa belanja materai, makan dan minum rapat, jasa tenaga administrasi, serta iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN. Realisasi Keuangan 89,84%
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp208.843.625, Realisasi belanja sebesar Rp203.081.686 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai. Bahan komputer, jasa pelayanan



kearsipan, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan dinas biasa. Realisasi Keuangan 97,24%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp475.000.000, Realisasi belanja sebesar Rp421.200.000, dengan keluaran berupa belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Mobil Kepala Dinas/Asisten). Realisasi Keuangan 88,67%.
2. Pengadaan Mebel
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp41.291.996, Realisasi belanja sebesar Rp40.950.000 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, serta belanja meubel. Realisasi Keuangan 99,17%.
3. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp51.665.453, Realisasi belanja sebesar Rp20.952.000 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, materai, serta mesin absen. Realisasi Keuangan 40,55%.
4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp20.181.818, Realisasi belanja sebesar Rp19.604.000, dengan keluaran berupa belanja gorden. Realisasi Keuangan 97,14%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp42.629.600, Realisasi belanja sebesar Rp42.091.400 dengan keluaran berupa belanja materai. Realisasi Keuangan 98,74%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp147.744.800, Realisasi belanja sebesar Rp136.838.221 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer, jasa tenaga administrasi, tagihan telepon, tagihan air, tagihan listrik, internet/tv berlangganan, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN serta belanja peralatan jaringan. Realisasi Keuangan 92,62%.



g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp378.868.800, Realisasi belanja sebesar Rp332.125.300 dengan keluaran berupa belanja bahan bakar dan pelumas, suku cadang alat angkutan, alat tulis kantor, kertas dan cover, materai, bahan komputer, jasa tenaga administrasi, pembayaran pajak, bea, dan perizinan serta iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, Realisasi Keuangan 87,66%.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp64.613.100, Realisasi belanja sebesar Rp45.455.000 dengan keluaran berupa belanja jasa tenaga operator komputer, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN, Pemeliharaan alat kantor(alat pendingin) dan pemeliharaan peralatan komputer. Realisasi Keuangan 70,35%.
3. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi anggaran kegiatan ini Rp327.000.000, Realisasi belanja sebesar Rp326.600.000, dengan keluaran berupa belanja bantuan sosial uang. Realisasi Keuangan 99,88%.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Program Kabupaten/Kota
Alokasi anggaran kegiatan ini Rp100.000.000, Realisasi belanja sebesar Rp -, Realisasi Keuangan 0,00%.

b. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/Atau Rumah Khusus

1. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp261.939.112, Realisasi belanja sebesar Rp223.951.955 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, pakaian dinas harian(PDH), jasa tenaga operator komputer, jasa tenaga kebersihan, jasa



tenaga keamanan, jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, tagihan listrik dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN . Realisasi Keuangan 85,50%.

c. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp83.689.825, Realisasi belanja sebesar Rp79.133.378, Dana tersebut digunakan untuk biaya belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, perabot kantor, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan rekayasa teknik, dan perjalanan dinas. Realisasi Keuangan 94,56%.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp160.111.207, Realisasi belanja sebesar Rp143.006.603, Dana tersebut digunakan untuk biaya belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, perabot kantor, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga operator komputer, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan rekayasa teknik, perjalanan dinas, dan belanja modal olar/tugu/tanda lainnya. Realisasi Keuangan 89,32%.

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp391.445.210, Realisasi belanja sebesar Rp385.594.500. Dana tersebut digunakan Belanja kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, serta jasa konsultasi perencanaan penata ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan. Realisali Keuangan 98,51%.



2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp32.174.950, Realisasi belanja sebesar Rp25.833.546. Dana tersebut digunakan Belanja kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, serta perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Realisali Keuangan 80,29%.

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp15.291.669, Realisasi belanja sebesar Rp15.098.600, Dana tersebut digunakan Belanja bahan bakar dan pelumas, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat, kursus/pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan. Realisasi Keuangan 99%.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp55.771.330, Realisasi belanja sebesar Rp49.570.140, Dana tersebut digunakan Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, sewa gedung dan bangunan, serta perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Realisasi Keuangan 88.89%.

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.867.537.660, Realisasi Belanja sebesar Rp1.855.498.800. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga ahli, jasa tenaga informasi dan teknologi, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, jasa konsultansi konstruksi, jasa konsultansi pengawasan arsitektur, jasa konsultansi pengawasan penataan ruang, perjalanan dinas biasa dan dalam kota, bantuan sosial, belanja modal tugu/tanda batas



lainnya, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Realisasi keuangan 99,36%.

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp149.304.304, Realisasi belanja sebesar Rp146.780.125, Dana tersebut digunakan Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, jasa tenaga admionistrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, jasa konsultasi konstruksi. Realisasi Keuangan 98,31%.

2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp29.932.414.958, Realisasi belanja sebesar Rp29.551.220.892, Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bangunan dan kontruksi, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak bahan komputer, parobot kantor, alat listrik, belanja makanan dan minuman, pakaian dinas lapangan, pakaian siaga, pakaian olahraga, jasa kantor, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga supir, jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, belanja tagihan listrik, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, jasa konsultasi konstruksi, belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman, belanja modal. Realisasi Keuangan 98,73%.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp256.680.173, Realisasi belanja sebesar Rp137.361.991, Dana tersebut digunakan belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, perlengkapan dinas, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga pelayanan umum, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan dinas biasa dan dalam kota, belanja bantuan sosial. Realisasi Keuangan 53,51%.



4. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp17.928.837, Realisasi sebesar Rp17.432.300, dana tersebut di gunakan untuk belanja alat listrik. Realisasi Keuangan 97,23%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun $n-2 = 2025-2 = 2023$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Program Pengembangan Perumahan
 - c. Program Kawasan Permukiman
 - d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - a. Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan
4. Faktor-faktor Penyebab :
 - a. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan SPM Standard Pelayanan Minimal yaitu:
 - Adanya refocusing anggaran pada beberapa program kegiatan dan sub kegiatan sehingga pelaksanaan rapat koordinasi menjadi terbatas.
 - b. Faktor Penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu:
 - Adanya Komitmen bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan program dan kegiatan.
 - Berusaha Seoptimal mungkin untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan yang direncanakan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang Perlu Diambil untuk mengatasi Faktor-faktor Penyebab.
Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

- Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2023 dan Renstra 2023 – 2026.
- Efisiensi alokasi belanja
- Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target
- Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas program/kegiatan sejenis dengan instansi terkait, presentasi pada pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan memaksimalkan sumberdaya yang ada.



Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.04.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	98.83%	BB	-	-
	1.04.01.2.01 <u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	80%	75,12%	80%	80%	92.23%	76%	-	-
	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	-	-
	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	39 Orang	40 Orang	34 Orang	100%	40 Orang	-	-
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	2769 Dokumen	2500 Dokumen	2500 Dokumen	100%	2500 Dokumen	-	-
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	78 Paket	81 Paket	81 Paket	100%	75 Paket	-	-
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	5 Orang	2 Orang	5 Orang	100%	15 Orang	-	-
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-	-
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-	-
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-	-



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	16 Laporan	100%	5 Laporan	-	-
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	38 Laporan	30 Laporan	47 Laporan	100%	30 Laporan	-	-
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	87.04%	100%	-	-
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					100%	35 unit	-	-
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit	22 unit	7 unit	5 unit	71.43%	21 unit	-	-
1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	-	-
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2.700 Surat	2.821 Surat	2.700 Surat	2.744 Surat	100%	4 Laporan	-	-
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	33 unit	29 unit	29 unit	100%	29 unit	-	-
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 unit	89 unit	89 unit	89 unit	100%	97 unit	-	-



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

2	01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.	63%	63%	65%	75%	80.85%	79.67%	-	-
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	-	-
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi			10 Unit Rumah	-	-	10 Unit Rumah	-	-
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93.43%	100,00%	-	-
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	17 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50 Laporan	55 Laporan	40 Laporan	36 Laporan	90%	5 Laporan	-	-



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

3	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	66,12%	66,55%	33,97%	33,97%	100%	35,95%	-	-
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	-	-
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	6 Laporan	6 Laporan	-	-	100%	1 Laporan	-	-
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Review Kebijakan PKP yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	3 Dokumen	-	-
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	35,95%	-	-
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	28 unit	28 unit	74 unit	74 unit	100%	81 unit	-	-
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
4	01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	88,00%	89,04%	93,16%	93,27%	98,73%	93,27%	-	-



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	88,00%	89,04%	93,16%	93,27%	98.73%	93,27%	-	-
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	500 Lokasi	500 Lokasi	500 Lokasi	453 Lokasi	98.73%	500 Lokasi	-	-
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	30 Laporan	30 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	85%	10 Laporan	-	-
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-	-	40 Laporan	22 Laporan	100%	1 Laporan	-	-



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan *bottom-up* dan *top down*, yang dikenal dengan istilah *shopping list key working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih terbuka, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

b. Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Optimalnya capaian indikator Kinerja Utama
- Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti jalan jalan lingkungan, parit/drainase dll



- c. Sedangkan Indikator Kinerja Sasarannya adalah sebagai berikut :
- Persentase indikator kinerja utama daerah sesuai target

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diatas, akan kami uraikan dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan tersebut dibawah ini :



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

NO	Indikator IKK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		139,24	160,60	167,57	174,54	139,24	139,24	160,60	167,57	174,54	
2	Jumlah unit peningkatan kualitas rumah RTLH		1.804,00	1.909,00	2.009,00	2.109,00	1.735,00	1.809,00	1.909,00	2.009,00	2.109,00	
3	Jumlah Backlog Rumah Tertangani		26.910,00	31.746,00	31.878,00	32.010,00	26.201,00	31.049,00	31.746,00	31.878,00	32.010,00	
4	Jumlah Lampu Jalan Tertangani		23.725,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	22.375,00	23.754,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	
5	Jumlah Lokasi Makam Tertangani		57,00	60,00	65,00	70,00	43,00	57,00	60,00	65,00	70,00	



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti jalan jalan lingkungan, parit/drainase dll.
2. Serah terima PSU Perumahan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup masyarakat.
3. Terlaksananya penanganan kawasan kumuh yang tercantum dalam SK Walikota Jambi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Pemerintah Kota Jambi dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Jambi terdapat perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Perbandingan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara rancangan awal RKPD dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Jambi yang selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan dan penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2025. Dimana Terkait masing masing OPD telah mendapatkan pagu maka ada program kegiatan yang berubah nilainya dan ada kegiatan yang tidak bisa dimasukkan dalam rencana kerja namun ada beberapa program baru yang diusulkan prioritas.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi merencanakan untuk melaksanakan 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 19 (sembilan belas)



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

kegiatan dan 128 (seratus dua puluh delapan) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 56.031.127.727,00. Pagu Indikatif DPRKP mengalami kenaikan sebesar Rp 682.497.517,00. Kenaikan pagu indikatif ini sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Rasionalisasi anggaran dilakukan dengan tanpa merubah output kegiatan maupun target kinerja output kegiatan.

Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan Analisis kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6.748.143.996	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6.748.143.996	
	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Kota Jambi	Peningkatan Nilai AKIP	78	110.458.022	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Kota Jambi	Peningkatan Nilai AKIP	78	110.458.022	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	67.095.860	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	67.095.860	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	43.362.162	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	43.362.162	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib administrasi keuangan	100%	4.924.962.601	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib administrasi keuangan	100%	4.924.962.601	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	4.485.560.521	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	4.485.560.521	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	387.380.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	387.380.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	52.021.280	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	52.021.280	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	141.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	141.600.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 80	80 Paket	66.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 80	80 Paket	66.600.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	75.000.000	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	601.421.618	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	601.421.618
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.336.765	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.336.765
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	186.255.563	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	186.255.563
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	97.763.040	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	97.763.040
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	17.599.050	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	17.599.050
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	290.467.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	290.467.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	362.388.755	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	362.388.755
Pengadaan Mebel	Kota Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	198.286.355	Pengadaan Mebel	Kota Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	198.286.355



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	164.102.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	164.102.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	167.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	167.500.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	Jumlah Surat Menyurat	3 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	Jumlah Surat Menyurat	3 Laporan	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	439.813.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	439.813.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	301.909.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	301.909.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	137.903.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	137.903.400	
2	Program Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.	80,00%	743.813.079	Program Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.	80,00%	743.813.079	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Jambi	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00%	162.943.938	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Jambi	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00%	162.943.938	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	162.943.938	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	162.943.938	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	580.869.141	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	580.869.141	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	286.086.344	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	286.086.344	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	294.782.797	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	294.782.797	
3	Program Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,83%	4.905.641.758	Program Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,83%	4.905.641.758	
		Kota Jambi	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	79,97%			Kota Jambi	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	79,97%		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,00%	51.611.150	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,00%	51.611.150	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	51.611.150	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	51.611.150	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Jambi	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	79,97%	327.296.585	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Jambi	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	79,97%	327.296.585	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	3 Dokumen	327.296.585	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	3 Dokumen	327.296.585	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Jambi	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,83%	4.526.734.023	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Jambi	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,83%	4.526.734.023	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Jambi	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	200 unit	4.489.547.343	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Jambi	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	200 unit	4.489.547.343	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	37.186.680	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	1 Laporan	37.186.680	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

								Permukiman Kumuh			
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,62%	40.549.352.642	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,62%	40.549.352.642	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,62%	40.549.352.642	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,62%	40.549.352.642	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	144.207.426	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	144.207.426	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Jambi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	400 Lokasi	40.214.743.061	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Jambi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	400 Lokasi	40.214.743.061	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	167.758.929	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	167.758.929	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	22.643.226	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	22.643.226	
					52.946.951.475					52.946.951.475	



Review Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2025, meliputi aspek :

1. Menyusun ulang Program dan Kegiatan yang ada di Rencana Strategis 2024-2026, disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah khususnya untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Perumahan dan Permukiman
 - Percepatan serah terima prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan dalam wilayah Kota Jambi dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Jambi.
 - Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang rumah sehat melalui penyuluhan-penyuluhan dikelurahan dalam kota jambi.
 - Penyuluhan rumah sehat serta inventarisasi rumah tidak layak huni.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang kota

Untuk menciptakan kawasan yang tertata, tertib dan teratur maka diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan membentuk tim pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dalam kota Jambi serta pengendalian terhadap perizinan yang dikeluarkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang melalui aplikasi Simreda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) dan yang akan menjadi prioritas utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, Program Daerah yang telah dituangkan dalam RPJM Kota Jambi Tahun 2024-2026.



Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum				
	Lampu Jalan	Kecamatan Alam Barajo	Pemasangan Lampu Jalan	145 <u>Unit</u>	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Danau Sipin	Pemasangan Lampu Jalan	16 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pelayangan	Pemasangan Lampu Jalan	24 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Telanaipura	Pemasangan Lampu Jalan	110 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Jelutung	Pemasangan Lampu Jalan	105 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Kota Baru	Pemasangan Lampu Jalan	76 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Paalmerah	Pemasangan Lampu Jalan dengan Tiang	32 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
	Pagar TPU	Kecamatan Telanai	Pembuatan Pagar	5 Pemakaman Umum	Usulan Aspirasi/Pokir



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kecamatan Kota Baru	Pembuatan Pagar	1 Pemakaman Umum	Usulan Aspirasi/Pokir
	Bedah Rumah	Kecamatan Telanai	Bedah Rumah	7 Rumah	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Kota Baru	Bedah Rumah	3 Rumah	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pelayangan	Bedah Rumah	3 Rumah	Usulan Aspirasi/Pokir
	Pembangunan wc/septitank	Kecamatan Telanai	Pembangunan wc/Septitank	6 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pelayangan	Pembangunan wc/Septitank	2 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Alam Barajo	Pembangunan wc/Septitank	1 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
	Pembuatan Sumur	Kecamatan Alam Barajo	Pembuatan Sumur	5 Sumur	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Telanai	Pembuatan Sumur	2 Sumur	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Danau Sipin	Pembuatan Sumur	2 Sumur	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pelayangan	Pemasangan Sumur	5 Sumur	Usulan Aspirasi/Pokir



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

3.1.1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
- Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang dimanakan dalam Undang- Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
- 2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.
- 3) Pembangunan Perumahan beserta prasarana sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

3.1.2. Undang - Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan



perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- 2) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 4) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- 5) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan
- 6) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- 7) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 8) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- 9) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 10) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- 11) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- 12) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- 13) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat



kabupaten/kota;

- 14) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- 15) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- 16) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- 17) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

3.1.3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:

- Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
- Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat : Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat :

- 1) Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan perumahan
- 2) Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satu rumah susun) yang dilengkapi PSU pendukungnya.
- 3) Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.
- 4) Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 5) Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:
 - a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial



- b. Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas
- c. Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.

3.1.4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pasal 4 disebutkan bahwa fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman dan utilitas perkotaan;
- b. Penyelenggaraan urusan perumahan, permukiman dan utilitas perkotaan;
- c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan utilitas perkotaan;
- d. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran DPRKP	Indikator Sasaran DPRKP
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni



3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.2.1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan .”

3.2.2. Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran Dinas Perumahan dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui penyusunan Rencana Kerja OPD adalah :

“Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni.”

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan dijelaskan pada Tabel 3.2 dan 3.3 berikut ini

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan DPRKP	Indikator Tujuan DPRKP	Target Kinerja Tujuan DPRKP Tahun 2025
1	2	3	4
1	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7,9

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran DPRKP	Indikator Sasaran DPRKP	Target Kinerja Sasaran DPRKP Tahun 2025
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	81,87 %

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Utama DPRKP	Target Indikator Kinerja Utama DPRKP Tahun 2025
1	2	3
1	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	81,87 %



3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.3.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain:

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan Dan Permukiman Layak Huni
- Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Berkualitas
- Kebijakan Anggaran Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kota Jambi sangat terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.

3.3.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 :

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Program Prioritas Tahun 2025

No	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	01.04.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.925.974.630	
1.1	1.04.01.2.01 <u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	137.323.191	
	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.093.376	
	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.229.815	
1.2	1.04.01.2.02 <u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	6.182.804.824	
	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.691.873.678	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	446.239.288	
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.691.858	
1.3	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.153.770	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76.153.770	
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	
1.4	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.211.524	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.472.337	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.381.753	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.302.267	
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.354.381	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.700.786	
1.5	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.515.198	
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.515.198	
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	
1.6	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.353.024	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.581.816	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.771.208	
1.7	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.613.099	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	458.431.248	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.181.851	
2	01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	788.867.629	
2.1	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	100.000.000	
2.2	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	187.000.000	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	187.000.000	
2.3	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	501.867.629	
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	105.867.629	

**DPRKP/KOTA JAMBI/2024**

	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	396.000.000	
3	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	11.100.768.756	
3.1	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	136.080.373	
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	136.080.373	
3.2	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.466.267.706	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.466.267.706	
3.3	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	9.498.420.677	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	9.410.502.641	
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	87.918.036	
4	01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	36.215.512.712	
4.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	36.215.512.712	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	414.998.198	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	35.405.077.540	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	369.619.449	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	25.817.525	
		Total	56.031.123.727	

Untuk keterangan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dapat dijelaskan dalam pada tabel T-C.33 berikut ini:



Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

No	Kode	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Rencana			
							2025		2026	
							Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)
1	1.04.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	7.925.974.630	A	9.607.072.093
	1.04.01.2.01				<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	78	137.323.190	80	151.055.509
	1.04.01.2.01.0001				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	86.093.376	7 dokumen	94.702.713
	1.04.01.2.01.0007				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	51.229.815	1 Laporan	56.352.796
	1.04.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	100%	6.182.804.824	100%	6.801.085.307
	1.04.01.2.02.0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	5.691.873.678	40 Orang	6.261.061.046
	1.04.01.2.02.0003				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	446.239.288	2500 Dokumen	490.863.217



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1.04.01.2.02.0007				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	44.691.858	12 Laporan	49.161.044
1.04.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	91.153.770	100%	103.769.147
1.04.01.2.05.0002				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 80	81 Paket	76.153.770	81 Paket	83.769.147
1.04.01.2.05.0011				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000	4 Orang	20.000.000
1.04.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	535.211.525	100%	588.732.677
1.04.01.2.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.472.337	1 Paket	8.219.571
1.04.01.2.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	220.381.753	1 Paket	242.419.928
1.04.01.2.06.0005				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.302.267	1 Paket	44.332.494
1.04.01.2.06.0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	14.354.381	5 Laporan	15.789.819
1.04.01.2.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	252.700.786	30 Laporan	277.970.865



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	1.04.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	212.515.198	100%	1.118.766.718
	1.04.01.2.07.0005				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Isian Gedung Baru	100.000.000	Isian Gedung Baru	100.000.000
	1.04.01.2.07.0006				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	62.515.198	7 unit	68.766.718
	1.04.01.2.07.0007				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Gedung Baru	50.000.000	Gedung Baru	50.000.000
	1.04.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	230.353.024	100%	253.388.326
	1.04.01.2.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2.760 Surat	51.581.816	3.000 Surat	56.739.998
	1.04.01.2.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178.771.208	12 Laporan	196.648.329
	1.04.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	536.613.099	100%	590.274.409
	1.04.01.2.09.0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	458.431.248	29 unit	504.274.373
	1.04.01.2.09.0006				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	78.181.851	100 unit	86.000.036
2	1.04.02				Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.	80,00%	788.867.629	80,03%	867.754.392
	1.04.02.2.03				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100,00%	100.000.000	100,00%	110.000.000



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	1.04.02.2.03.0001				Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi	10 Unit	100.000.000	11 Unit	110.000.000
	1.04.02.2.05				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00%	187.000.000	100,00%	205.700.000
	1.04.02.2.05.0002				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	187.000.000	1 Dokumen	205.700.000
	1.04.02.2.06				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	501.867.629	100,00%	552.054.392
	1.04.02.2.06.0001				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	105.867.629	20 Dokumen	116.454.392
	1.04.02.2.06.0003				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	396.000.000	5 Laporan	435.600.000
					Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,83%	11.100.768.756	39,72%	13.320.922.507
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		79,97%	83,45%			



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	1.04.03.2.01				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	100,00%	136.080.373	100,00%	163.296.448
	1.04.03.2.01.0004				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	136.080.373	1 Laporan	163.296.448
	1.04.03.2.02				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	79,97%	1.466.267.706	83,45%	105.501.643
	1.04.03.2.02.0008				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Review Kebijakan PKP yang disusun	2 Perda	1.466.267.706	2 Perda	1.759.521.247
	1.04.03.2.03				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,83%	9.498.420.677	39,72%	11.292.603.169
	1.04.03.2.03.0002				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100 unit	9.410.502.641	100 unit	11.292.603.169
	1.04.03.2.03.0004				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	87.918.036	1 Laporan	105.501.643
3	1.04.05				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,62%	36.215.512.712	95,00%	42.228.615.253



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	1.04.05.2.01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,62%	36.215.512.712	95.00%	42.228.615.253
	1.04.05.2.01.0001			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	414.998.198	2 Dokumen	457.997.837
	1.04.05.2.01.0002			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1750 Pemasangan PJU, 1750 Pemeliharaan PJU, 98 Pemeliharaan Makam, 15 Pembangunan Makam dan 2 Lokasi Jalan Lingkungan Perumahan	35.405.077.540	2000 Pemasangan PJU, 2000 Pemeliharaan PJU, 98 Pemeliharaan Makam, 15 Pembangunan Makam dan 2 Lokasi Jalan Lingkungan Perumahan	41.296.093.047
	1.04.05.2.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	369.619.449	10 Laporan	443.543.339
	1.04.05.2.01.0010			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Dokumen	25.817.525	1 Dokumen	30.981.030
	Total						56.031.123.727		66.024.364.245



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah– masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Dengan Kegiatan Sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- d. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI TAHUN

2025

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	2025	
			Target Kinerja	Pagu (Rp)
1	1.04.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	7.925.974.630
	1.04.01.2.01 <u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	78	137.323.190
	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	86.093.376
	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	51.229.815
	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	100%	6.182.804.824
	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	5.691.873.678
	1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	446.239.288
	1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	44.691.858
	1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	91.153.770
	1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket	76.153.770
	1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000
	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	535.211.525
	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.472.337
	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	220.381.753
	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.302.267



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	1.04.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	14.354.381
No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	2025	
				Target Kinerja	Pagu (Rp)
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	252.700.786
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	212.515.198
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Isian Gedung Baru	100.000.000
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	62.515.198
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Gedung Baru	50.000.000
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	230.353.024
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2.760 Surat	51.581.816
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178.771.208
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	536.613.099
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	458.431.248
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	78.181.851
2	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.	80,00%	788.867.629
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100,00%	100.000.000
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi	10 Unit	100.000.000
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00%	187.000.000
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	187.000.000
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	501.867.629



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	105.867.629
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	396.000.000
No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	2025		
			Target Kinerja	Pagu (Rp)	
3	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,83%	11.100.768.756
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,00%	136.080.373
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	136.080.373
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	79,97%	1.466.267.706
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Review Kebijakan PKP yang disusun	2 Perda	1.466.267.706
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,83%	9.498.420.677
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100 unit	9.410.502.641
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	87.918.036
4	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,00%	36.215.512.712
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,00%	36.215.512.712
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	414.998.198

**DPRKP/KOTA JAMBI/2024**

1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1750 Pemasangan PJU, 1750 Pemeliharaan PJU, 98 Pemeliharaan Makam, 15 Pembangunan Makam dan 2 Lokasi Jalan Lingkungan Perumahan	35.405.077.540
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	369.619.449
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Dokumen	25.817.525
Total				56.031.123.727

BAB V**PENUTUP**

Salah satu upaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada Masyarakat pada sektor perumahan rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi senantiasa berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan RKPD Kota Jambi. Namun kami menyadari bahwa program dan kegiatan yang sudah kami tuangkan dalam Rencana Kerja sebagai rujukan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum maksimal .

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Evaluasi yang di laksanakan ada beberapa kegiatan yang belum dapat di laksanakan , hal ini disebabkan karena masih terbatasnya Anggaran yang tersedia .
- Ada beberapa kegiatan yang progressnya belum maksimal, hal ini disebabkan karena sarana penunjang perlu ditingkatkan.
- Ada beberapa kegiatan yang progressnya telah maksimal.

Untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan sektor perumahan kepada masyarakat maka diharapkan ada peningkatan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

Permukiman Kota Jambi, sehingga capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara maksimal dan komprehensif.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang transparan dan akuntabel serta komprehensif maka pembangunan perumahan dan prasarana , sarana dan utilitas pendukung dapat berjalan secara baik dan optimal sehingga semua pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dapat mendukung visi, misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Ada beberapa hal yang secara terus-menerus perlu mendapat perhatian sehingga kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara bertahap dapat dipenuhi. Sebagai upaya untuk melakukan percepatan pemenuhan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni harus dilaksanakan melalui berbagai sumber dana, diantaranya adalah dana APBD, APBN serta peran aktif seluruh masyarakat yang di usulkan secara hirarkhi melalui Simreda milik Pemerintah Kota Jambi.

Rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini kami buat sesuai dengan ketentuan-ketentuan / aturan-aturan yang lebih berlaku dan kebijakan Kepala daerah dan Dewan yang terhormat. Hal ini perlu dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan penyesuaian penyesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan.

Demikian untuk di maklumi terima kasih.

Jambi, Mei 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI**

MAHRUZAR, ST
Pembina Tk.I

NIP. 19780127 200501 1 004